

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan masih menjadi masalah terpenting di dunia. Hal ini dibuktikan bahwa kemiskinan menjadi tujuan utama dalam *Millenium Development Goals* (MGDs) untuk tahun 2000 – 2015 yang telah disepakati oleh 189 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Dari delapan komponen MDGs, penanggulangan kemiskinan dan kelaparan merupakan prioritas utama. Berdasarkan evaluasi dan monitoring pencapaian MDGs, salah satu indikator dengan kategori merah atau belum tercapai adalah penurunan kemiskinan (Bappenas, 2022). MGDs dilanjutkan dan diperluas cangkupannya dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan berisikan 17 tujuan dengan pengentasan kemiskinan berada pada tujuan nomor satu dalam SDGs yang perlu dituntaskan oleh seluruh negara di dunia.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat jangka panjang sehingga sulit untuk diatasi hingga saat ini (Ristika et al., 2021). Masalah kemiskinan seringkali ditandai dengan keterbelakangan dan ketertinggalan, rendahnya produktivitas dan rendahnya pendapatan yang diterima, keterbatasan akses dan kemampuan serta kesempatan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraan (Putri et al., 2019).

Menurut Susanto & Pangesti, (2019) Berdasarkan teori lingkaran kemiskinan dapat diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan diantaranya tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan besarnya konsumsi. Selain itu, menurut Ristika et al., (2021) terdapat beberapa faktor penyebab munculnya kemiskinan, yaitu: rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), tidak terkontrolnya sumber daya alam (SDA) yang dikelola, masih rendahnya tingkat pendidikan, tidak adanya pengetahuan dalam mengembangkan sektor-sektor perekonomian, tingkat pengangguran yang

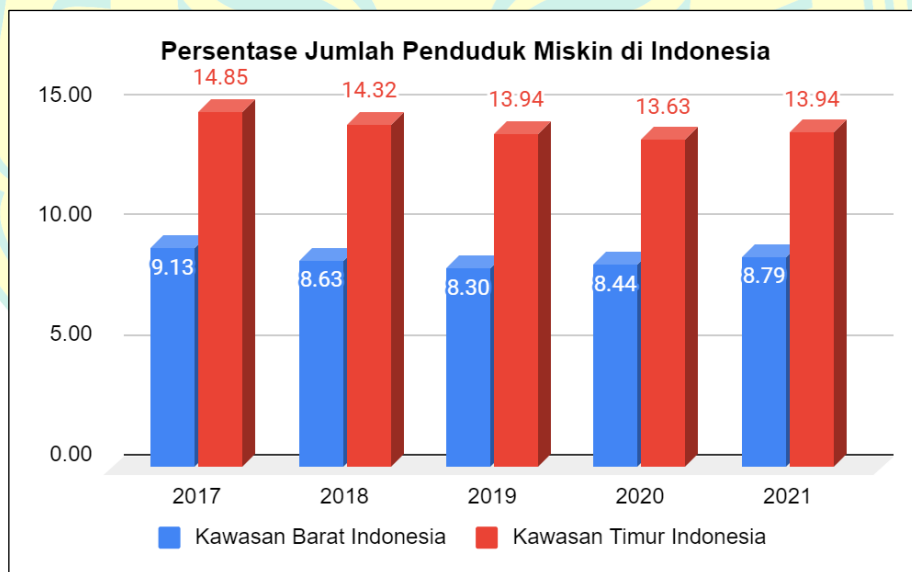
semakin tinggi, serta pertumbuhan ekonomi yang terus menurun. Menurut Akhsyim & , Dwi Wahyuni, (2017) kemiskinan yang terjadi diseluruh dunia dikarenakan faktor turun-temurun. Ketika orang tua dari keluarga miskin memiliki anak laki-laki atau anak perempuan, mereka juga akan hidup dalam kemiskinan, sama seperti orang tua mereka. Pada kenyataannya, fenomena tersebut kerap kali ditemukan di Indonesia.

Berdasarkan data *World Population Review* Indonesia masuk dalam 100 negara termiskin di dunia berdasarkan pendapatan nasional perkapita dengan urutan 73 di tahun 2020 dan 91 di tahun 2022 dengan angka PDB RI sebesar US\$14.535 (CNN Indonesia, 2022). Posisi tersebut memang lebih baik jika dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lainnya. Namun, kemiskinan tetap menjadi persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian bagi pemerintah di negara manapun baik di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia.

Badan Pusat Statistik, (2022) mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperluka seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Berdasarkan Databoks, (2023) jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 26,36 juta jiwa pada September 2022, bertambah sekitar 200 ribu orang dibanding Maret 2022.

Menurut Kasriyati, (2018) terdapat tiga karakteristik umum dari kemiskinan yang ada di Indonesia, yaitu: 1) Sebagian besar rumah tangga ada di dekat garis kemiskinan nasional, hal ini mengakibatkan banyaknya penduduk yang rawan terhadap kemiskinan; 2) Kemiskinan di Indonesia tidak memperhitungkan garis kemiskinan yang sesungguhnya, pendapatan menjadi ukuran dasar kemiskinan; 3) Luasnya wilayah Indonesia dan beragam perbedaan antar wilayah merupakan karakteristik dasar dari kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan Kementerian Dalam Negeri Indonesia, (2017) tentang kodefikasi dan tata wilayah administrasi per provinsi menyebutkan jumlah provinsi di Indonesia sebanyak 34 provinsi. Provinsi-provinsi tersebut terbagi menjadi dua kawasan yang kemudian dikenal dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kedua kawasan tersebut memperlihatkan kecenderungan bahwa provinsi-provinsi yang terletak di Kawasan Barat Indonesia (KBI) pada umumnya mengalami perkembangan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan daerah atau provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Misalnya ketersediaan infrastruktur, sarana transportasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan di KBI jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI).



Gambar 1. 1 Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

Sumber: BPS, data diolah Penulis

Berdasarkan gambar diatas, kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) secara rata-rata. Perbandingan diantara dua kawasan tersebut juga terpaut jauh. Hal ini membuktikan bahwa tingginya kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia merupakan sebuah permasalahan yang perlu diatasi.

Dilansir melalui DetikFinance, (2018) kemiskinan di Indonesia sejak September 2017 masih terpusat di Indonesia bagian Timur, yakni Maluku dan Papua dengan persentase 21,23%. Menurut laporan analisis kemiskinan oleh Bappenas, (2018) menyebutkan bahwa sebagian besar provinsi di wilayah KTI masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dengan angka kemiskinan di atas rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2018 mengalami penurunan 9,82%. Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di hampir seluruh provinsi. Namun sebaliknya, di beberapa provinsi bagian timur mengalami kenaikan kemiskinan dari tahun sebelumnya, yaitu di NTT, Maluku Utara, dan Papua. Bahkan, di beberapa provinsi seperti NTT dan Papua, kemiskinan tidak mengalami penurunan dari beberapa tahun sebelumnya.



Gambar 1. 2 Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Kawasan Timur Indonesia (KTI) tahun 2021

Sumber: BPS, data diolah Penulis

Berdasarkan gambar diatas, dapat kita lihat bahwa provinsi yang memiliki persentase kemiskinan tertinggi pada tahun terakhir yakni 2021 adalah provinsi Papua sebesar 26.86% kemudian disusul dengan provinsi Papua Barat sebesar 21.84% dan NTT sebesar 20.99%. Sedangkan provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang menunjukkan persentase kemiskinan terendah yaitu

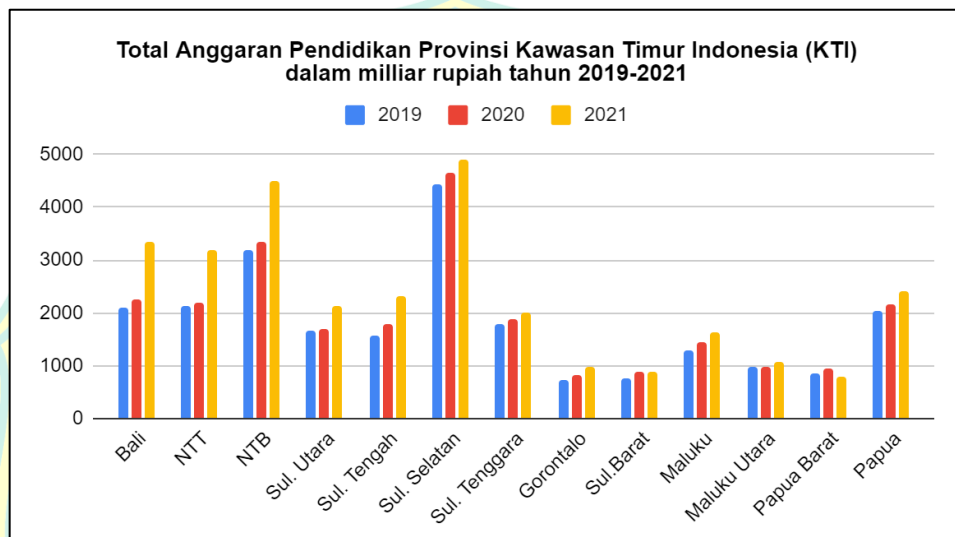
provinsi Bali sebesar 4.53% yang jika dilihat secara faktual memiliki kondisi perekonomian yang cukup baik. Artinya, kemiskinan masih menjadi masalah bagi sebagian besar provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Masalah kemiskinan bukan hanya melihat berapa jumlah dan persentase penduduk miskin semata. Terdapat dimensi lain yang harus diperhatikan salah satunya adalah tingkat kedalaman kemiskinan. Menurut BPS, (2022) Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Indonesia berada di angka 1.56% pada September 2022 turun 0,11% dibanding posisi September 2021 (Databoks, 2022). Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Gorontalo merupakan provinsi dengan indeks kedalaman kemiskinan terbesar dengan tingginya kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin di wilayah tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok dibandingkan dengan provinsi lainnya. Dengan demikian, indeks kedalaman kemiskinan membuat anggaran untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah tersebut lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI) berkaitan dengan naiknya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor, pendidikan, kesehatan serta infrastruktur yang meningkat setiap tahunnya tetapi menjadi pertanyaan apakah bisa memberikan efek yang besar terhadap penurunan persentase penduduk miskin atau bahkan sebaliknya (Hidayat & Azhar, 2022). Dalam hal ini, artinya pemerintah berperan penting dalam mengurangi kemiskinan. Pengaruh pemerintah sangat besar dalam pembuatan keputusan atau kebijakan yang bersifat memihak warga kurang mampu (Evita & Primandhana, 2022).

Wujud nyata dari adanya campur tangan pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan adalah dengan adanya pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah (Goni et al., 2022). Memasuki era desentralisasi, pemerintah daerah mempunyai otoritas dalam

menentukan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk membiayai pembangunan di sektor-sektor yang merupakan determinan utama dalam pertumbuhan ekonomi termasuk pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan.



Gambar 1. 3 Total Anggaran Pendidikan Provinsi Kawasan Timur Indonesia (KTI) tahun 2019-2021

Sumber: BPS, data diolah Penulis

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa total pengeluaran pemerintah disektor pendidikan mengalami peningkatan jumlah anggaran dari tahun ke tahun yang terjadi hampir diseluruh provinsi, kecuali Sulawesi barat ditahun 2021 dan Maluku Utara ditahun 2020 yang mengalami penurunan. Dengan meningkatnya anggaran pendidikan hampir di seluruh provinsi, namun tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi tersebut tidak mengalami penurunan. Pengeluaran pemerintah dalam anggaran pendidikan seharusnya dapat memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hatta, (2018) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan adalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya jika variabel pengeluaran bidang pemerintah naik sebesar satu persen maka jumlah kemiskinan akan turun

sebesar 0.06%. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mukthadila Indah & Heriqbaldi, 2022) bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, besarnya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dapat dijadikan faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Selain berdasarkan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Kualitas SDM dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendahnya IPM akan berakibat pada rendahnya produktifitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya memperoleh pendapatan, sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan terjadinya kemiskinan (Suherman et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Sayifullah & Gandasari, (2016) mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan pengaruh yang positif dan signifikan, Indeks Pembangunan Manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (*Longevity*) dan hidup sehat (*healthy life*), mendapatkan pengetahuan (*the knowledge*) dan mempunyai akses kepada sumber daya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan.

Penelitian lain dilakukan oleh Suliswanto, (2012) yang mengatakan variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap besarnya kemiskinan adalah IPM. Kemudian penelitian oleh (Fadila & Marwan, 2020) menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Sumatera Barat dengan koefisien regresi sebesar -0.27. Artinya, apabila Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan sebesar satu persen maka jumlah penduduk miskin akan berkurang sebesar 0.27%, sebaliknya saat Indeks Pembangunan Manusia

mengalami penurunan hingga satu persen maka Jumlah Penduduk Miskin akan meningkat sebesar 0.27%.

Penelitian selanjutnya oleh Mukhtar et al., (2019) mengatakan bahwa variabel IPM (Indeks Pembangunan Manusia) secara parsial berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Pengaruh yang masih sedikit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan dikarenakan masih adanya ketimpangan dalam peningkatan IPM di seluruh wilayah Indonesia, selain itu faktor kesadaran yang masih rendah di Indonesia baik itu dari orang tua atau anak itu sendiri. Dari beberapa penelitian tersebut maka IPM dapat dijadikan sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi kemiskinan.

Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat dikurangi dengan perekonomian yang bertumbuh. Sebaliknya, dalam keadaan perekonomian yang stagnan atau terkontraksi, jumlah penduduk miskin akan meningkat dengan cepat (Tri Wahyuni & Damayanti, 2014). Hal tersebut dapat dibuktikan pada saat periode sebelum krisis tahun 1997 kemiskinan di Indonesia menurun dengan cepat. Memasuki tahun 1998-1999 saat puncak krisis ekonomi, kemiskinan di Indonesia meningkat dengan cepat. Menurut Fitri & Eviza, (2021) dengan adanya pertumbuhan ekonomi itu menandakan bahwa terdapat peningkatan produksi sehingga menambah lapangan pekerjaan yang ada pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Maka upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan karena dapat berimbang dengan penurunan tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan untuk wilayah/regional dalam suatu periode tertentu dapat dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (BPS, 2023). Menurut Awruni Dwi A & Kartika N, (2019) PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam

penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan et al., (2022) mengatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado. Artinya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai peranan paling penting bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Manado, Sulawesi Utara. Penelitian lainnya yang telah dilakukan oleh Giovanni, (2018) bahwa variabel PDRB signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY hal ini disebabkan karena nilai PDRB yang semakin meningkat setiap tahunnya dan menyebar di semua golongan baik itu golongan atas, menengah, maupun bawah termasuk penduduk miskin di Provinsi tersebut sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan. Penelitian ini merupakan pembaharuan dari penelitian sebelumnya dikarenakan data yang digunakan lebih baru yaitu rentang tahun 2017-2021 serta wilayah yang dijadikan studi kasus adalah Kawasan Timur Indonesia yang menarik untuk diteliti karena masih sedikit pada penelitian sebelumnya.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan peneliti sebelumnya, pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Kemiskinan?
2. Apakah terdapat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan?
3. Apakah terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan?

4. Apakah terdapat pengaruh Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pengeluaran Pemerintah sektor pendidikan terhadap Kemiskinan
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan secara simultan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil atau temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan bagi pembaca khususnya yang berelasi dengan pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, IPM, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi informasi untuk pembaca tentang faktor yang akan mempengaruhi kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI)

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini memperluas pengetahuan serta wawasan peneliti terutama mengenai kemiskinan, faktor yang mempengaruhi kemiskinan, dan dampak dari kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI)